



HUBUNGAN INTELLECTUAL CAPITAL DAN KINERJA BELANJA PADA INSTANSI PEMERINTAH

Christian Dewabrata¹

Program Studi Magister Akuntansi Universitas Tarumanegara

Amrie Firmansyah²

Politeknik Keuangan Negara STAN

Dina Andrias³

Program Studi Magister Akuntansi Universitas Tarumanegara

Ribka Putrita Tarigan⁴

Program Studi Magister Akuntansi Universitas Tarumanegara

Estralita Trisnawati⁵

Magister Akuntansi, Universitas Tarumanegara

Alamat Korespondensi: christian.127221011@stu.untar.ac.id¹, amrie@pknstan.ac.id²,
dina.127221009@stu.untar.ac.id³, ribka.127221021@stu.untar.ac.id⁴, estralitat@fe.untar.ac.id⁵

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[13 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[18 12 2022]

KATA KUNCI:

Belanja, Instansi Pemerintah, Modal Intelektual

KLASIFIKASI JEL:

H83, M41, M48,

ABSTRACT

This study examines intellectual capital's effect on spending performance. Intellectual capital in this study is divided into three types: public human capital, public organizational capital, and relational public capital. Purposive sampling was employed in determining the sample for this study, totaling 41 observations. The respondents are budget management employees at the Directorate General of Intellectual Property, Indonesia Ministry of Law and Human Rights. The results suggest that public human capital, public organizational capital, and public relational capital positively influence spending performance. This research contributes to the literature on testing intellectual capital in public sector organizations which are still rarely done, especially using Indonesian data.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital terhadap kinerja belanja pada instansi pemerintah. Capital intellectual dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu public human capital, public organizational capital dan relational public capital. Purposive sampling digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini yang berjumlah sebanyak 41 observasi. Responden penelitian merupakan pegawai pengelola anggaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa public human capital, public organizational capital, dan relational public capital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja belanja. Penelitian ini memberikan kontribusi literatur dalam pengujian intellectual capital pada organisasi sektor publik yang masih jarang dilakukan khususnya dengan menggunakan data Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin memudahkan layanan untuk mengakses informasi dan komunikasi, meningkatkan kesadaran masyarakat atas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, institusi pemerintah saat ini sedang banyak disorot oleh masyarakat karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan sektor publik. Berbagai kritik, saran dan tuntutan telah diajukan oleh masyarakat kepada institusi pemerintah terkait pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Kinerja dalam instansi pemerintah banyak dikaitkan dengan kinerja dalam penggunaan belanja yang dilakukan oleh instansi tersebut dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mendorong pencapaian berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan (Widyatama, 2022). Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja

pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan (Widyatama, 2022). Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Akan tetapi, seringkali belanja negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah dianggap kurang tepat sasaran.

Idealnya belanja pemerintah berperan penting dalam mendorong perekonomian masyarakat. Sayangnya ruang dalam anggaran yang dimiliki pemerintah terbatas. Kondisi belanja yang terjadi saat ini adalah belanja rutin yang tidak dapat ditinggalkan dan terus menjadi beban belanja yang paling besar (Hesda, 2017). Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan belanja pegawai dan belanja barang, yang seharusnya digunakan untuk belanja-belanja yang produktif. Adapun komposisi belanja negara tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1

Perkembangan Alokasi dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis 2018-2021 (triliun Rupiah)

	2018		2019		2020		2021
	APBN	LKPP	APBN	LKPP	APBN	Outlook	RAPBN
Belanja Pemerintah Pusat							
Belanja Pegawai	365,69	346,89	381,56	376,07	416,20	403,72	420,70
Belanja Barang	340,13	347,47	345,23	334,42	337,02	273,16	357,38
Belanja Modal	203,88	184,13	189,34	177,84	186,91	137,38	250,30
Pembayaran Bunga Utang	238,61	257,95	275,89	275,52	295,21	338,78	373,26
Subsidi	156,23	216,88	224,32	201,80	187,61	192,02	172,91
Belanja Lain-lain	67,24	16,16	114,00	11,70	127,97	450,57	208,57
Belanja Hibah	1,46	1,52	1,94	6,48	2,18	5,07	6,78
Bantuan Sosial	81,26	84,32	102,06	112,48	107,63	174,52	161,36

Sumber: Zahara et al. (2020)

Belanja kementerian dan lembaga atau instansi pemerintah pusat masih belum bisa dikatakan produktif saat ini karena belanja negara masih banyak dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif seperti belanja pegawai dan belanja barang yang dari tahun ke tahun melebihi 60% dari total anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (Citradi, 2020). Berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI), setiap pertambahan 1% dari pengeluaran pemerintah yang berbasis konsumsi, hal ini akan meningkatkan output perekonomian sebesar 0,03% dalam jangka waktu yang panjang (Citradi, 2020). Sementara itu, terkait pengeluaran berbasis investasi seperti belanja modal, setiap pertambahan 1% akan menambahkan output ekonomi 0,2% dalam jangka panjang (Citradi, 2020). Jadi dampak belanja negara akan lebih besar dirasakan oleh rakyat jika pemerintah lebih rajin berinvestasi, bukan cuma mengonsumsi (Citradi, 2020).

Kinerja belanja pemerintah yang masih belum optimal dapat mengakibatkan kurang tepatnya sasaran dari tujuan utama belanja tersebut. Sebagian besar alokasi belanja negara masih digunakan untuk belanja yang bersifat konsumtif seperti belanja pegawai dan belanja barang. Kondisi ini mengakibatkan belanja layanan dasar kepada masyarakat belum dapat dipenuhi secara optimal. Dalam konteks teori

keagenan, pemerintah dapat berfungsi sebagai agen, sedangkan masyarakat sebagai prinsipal (Firmansyah et al., 2020). Adanya informasi asimetri antara keduanya, mengakibatkan hak yang harus diterima oleh masyarakat menjadi kurang optimal. Di sisi instansi pemerintah, keterbatasan anggaran mengakibatkan pelayanan tersebut masih belum dapat diberikan dengan optimal. Dengan demikian, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja belanja pemerintah perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya yang mengulas kinerja belanja lebih banyak dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja dan anggaran belanjanya (Amelia, 2022; Chartady et al., 2022; Hasanah & Vidiyastutik, 2018; Katit & Pitanik, 2016; Liando & Elim, 2016), bukan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja belanja pemerintah. Penelitian lainnya menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan instansi pemerintah, namun bukan spesifik atas kinerja belanja pemerintah (Atmoko & Khairudin, 2022; Fernandes & Putri, 2022; Niswani et al., 2022; Permatasari & Trisnainingsih, 2022; Rahman et al., 2022; Simamora & Budiwitjaksono, 2022). Kinerja belanja merupakan bagian dari kinerja organisasi pada instansi pemerintah, sehingga kinerja belanja mendukung atas kinerja organisasi secara

keseluruhan. Pengujian sebelumnya yang telah menguji kinerja organisasi instansi pemerintah dilakukan oleh Dahlan & Madjodjo (2020), Dwiningwarni & Dindah (2017), Ednoer et al. (2022), Meirina & Dewi (2021), Tahar & Kuncahyo (2020) dan Yulianti & Hamdiah (2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja belanja pemerintah. *Intellectual capital* mencakup semua pengetahuan sumber daya manusia, organisasi dan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif berkelanjutan (Bontis, 1998). Oleh karena itu, pengujian *intellectual capital* terhadap kinerja belanja pemerintah penting untuk diinvestigasi lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan konsep *intellectual capital* sektor publik yang dibangun oleh Campos et al. (2006) yang terdiri dari *public human capital*, *public organizational capital* dan *relational public capital*. Komponen ini juga digunakan oleh Ednoer et al. (2022), namun penelitian tersebut menguji kinerja organisasi secara umum, sedangkan penelitian ini menguji kinerja belanja yang lebih spesifik pada instansi pemerintah. Pengujian dalam penelitian ini masih jarang dilakukan dalam penelitian sebelumnya, khususnya dengan menggunakan data Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengujian *intellectual capital* pada organisasi sektor publik khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh organisasi sektor publik terkait pertimbangan dalam menempatkan komponen *intellectual capital* dalam kebijakan implementasi kinerja organisasi maupun kinerja belanja secara spesifik.

2. KERANGKA TEORI

Menurut Barney (1991), agar mampu mencapai keunggulan kompetitif yang terus menerus, suatu organisasi harus memperhatikan sumber dayanya yaitu sumber daya yang menambah nilai positif bagi organisasi, sumber daya yang sulit untuk ditiru oleh pesaingnya, sumber daya yang bersifat unik atau langka diantara pesaingnya, sumber daya yang tidak tergantikan dengan sumber lainnya oleh pesaingnya.

Berdasarkan pendekatan *resource-based view*, sumber daya yang ada pada suatu instansi pemerintah memiliki peran penting terhadap kinerja instansi pemerintahan, yang selanjutnya secara spesifik juga berdampak pada kinerja belanja. Terkait dengan hal tersebut, *intellectual capital* merupakan aset tak berwujud, termasuk informasi dan pengetahuan yang dimiliki badan usaha yang harus dikelola dengan baik untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi badan usaha (Gunawan & Tan, 2014). Konsep *human capital* menempatkan manusia bukan hanya sebagai sumber daya manusia, melainkan juga sebagai modal yang dapat menghasilkan

pengembalian dan sebagai wujud kegiatan investasi dalam organisasi. Dalam proses organisasi melakukan rekrutmen dan penempatan, *human capital* menjadi proses fundamental yang sangat penting bagi organisasi dalam mendapatkan pegawai yang kompeten. Keberhasilan organisasi di masa depan sangat bergantung pada proses seleksi yang dilakukan oleh bagian rekrutmen pegawai. Menurut Hossain & Roy (2016), *human capital* terdiri dari intelegensia, keterampilan, dan keahlian yang diberikan kepada organisasi sehingga mampu memberikan karakter yang berbeda.

Human capital berperan untuk menciptakan kekayaan intelektual karena hanya sumber daya manusia yang dapat menciptakan pengetahuan dan juga memiliki pengetahuan (Bontis, 1998). Sementara itu, pengetahuan merupakan unsur terpenting dalam proses penciptaan nilai organisasi, sehingga penciptaan nilai bagi suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh modal manusia (Ramadani, 2020). Siswanto (2020) menyatakan bahwa *human capital* merupakan sesuatu yang penting bagi kemajuan organisasi, karena dapat mempengaruhi produktivitas. Farah & Abouzeid (2017) menemukan bahwa *human capital* memiliki dampak positif terhadap kinerja organisasi di sektor publik. Selain itu, Hesda (2017) menyatakan bahwa permasalahan belanja negara pada umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja. *Human capital* pada suatu organisasi pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam implementasi belanja negara. Kinerja belanja dari suatu organisasi bergantung pada kemampuan dan keahlian yang melekat pada pegawai dalam organisasi tersebut.

H1: *Public human capital* berpengaruh positif terhadap kinerja belanja.

Dalam konteks *resource-based view*, suatu organisasi dapat berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitifnya apabila memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di dalamnya, termasuk kemampuan struktur atau organisasi. Apabila dikaitkan dengan *intellectual capital*, kemampuan tersebut erat kaitannya dengan *organizational capital*. *Organizational capital* atau *structural capital* merupakan akumulasi dan penggunaan informasi pribadi untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam suatu organisasi (Bontis, 1998). Modal ini dapat menjadi sumber nilai organisasi yang signifikan. Selain itu, Baroroh (2013) menyatakan bahwa *organizational capital* merupakan kemampuan organisasi meliputi infrastruktur, sistem informasi, rutinitas, prosedur dan budaya organisasi yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan intelektual yang optimal. Unsur-unsur di dalamnya meliputi *hardware*, *software*, *database*, struktur organisasi, hak paten, nama baik organisasi dan hal lainnya yang digunakan karyawan untuk mendukung proses dan aktivitas bisnis organisasi (Bontis, 1998).

Organizational capital tidak dapat dipisahkan sebagai bagian penting dari *intellectual capital* karena dukungannya sangat besar atas infrastruktur, sistem dan prosedur yang baik pada suatu organisasi. *Organizational capital* juga dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Ednoer et al. (2022) menyimpulkan bahwa *public organizational capital* berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Sejalan dengan temuan tersebut, Farah & Abouzeid (2017) menemukan bahwa *organizational capital* dapat meningkatkan kinerja organisasi di sektor publik. Selanjutnya, Hesda (2017) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja negara dapat dilakukan dengan cara penajaman peran *person in charge* anggaran, penyusunan analisis kebutuhan yang komprehensif, evaluasi *value for money*, dan meningkatkan pemahaman penyelenggara negara terkait mekanisme bisnis dan pasar. Suatu institusi pemerintah, dapat meningkatkan kinerja belanjanya apabila telah menerapkan sistem dan prosedur yang efektif dan efisien, termasuk di dalamnya terkait dengan implementasi belanja yang berkualitas.

H2: *public organizational capital* berpengaruh positif terhadap intellectual capital

Hubungan suatu organisasi yang baik dengan para pelanggan dan relasi merupakan salah satu keunggulan suatu organisasi dibandingkan dengan organisasi lainnya. Kondisi tersebut sejalan dengan *resource-based view* bahwa salah satu sumber daya yang dimiliki suatu organisasi adalah hubungan organisasi dengan para relasinya. Apabila dikaitkan dengan *intellectual capital*, hubungan organisasi dengan para relasinya dikenal dengan *relational capital*. *Relational capital* merupakan suatu nilai yang diciptakan melalui hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal, misalnya pelanggan, calon pelanggan, organisasi lain, pemangku kepentingan, dan investor (Grasenick & Low, 2004). Selain itu, *relational capital* merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh organisasi dengan para mitranya, dengan pemerintah maupun masyarakat sekitar (Bontis, 1998).

Dalam menjalankan pekerjaannya, institusi pemerintah tentu berhubungan langsung dengan banyak organisasi lain baik sesama organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keberhasilan program pemerintah menjadi tolak ukur penilaian kepercayaan masyarakat. Kinerja belanja pada instansi pemerintah merupakan salah satu indikator yang menjadi sorotan

baik oleh instansi itu sendiri maupun masyarakat. Kinerja belanja pemerintah dikatakan berkualitas apabila dapat memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, tuntutan atas belanja pemerintah harus dikelola secara transparan dan akuntabel atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas belanja yang dilakukan (Satria et al., 2018). Terkait dengan hal tersebut, Ednoer et al. (2022) menemukan bahwa *relational public capital* dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kemampuan instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja organisasinya salah satunya didukung dengan kemampuan instansi tersebut berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Instansi pemerintah akan memiliki kinerja belanja yang lebih baik apabila melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya, sehingga distribusi belanja dari instansi tersebut menjadi lebih optimal.

H3: *relational public capital* berpengaruh positif terhadap kinerja belanja

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui kuesioner yang disebar dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 September 2022. Kuesioner disebar kepada 56 responden. Kriteria responden dengan *purposive sampling* adalah responden merupakan PIC dan pelaksana anggaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pegawai tersebut berusia diatas 25 tahun, masa kerja diatas 1 tahun dengan pendidikan minimal Diploma 3. Total responden yang mengisi kuesioner yang disebar sebanyak 48 responden, di mana terdapat 7 sampel yang tidak lengkap sehingga jumlah sampel final yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 41 responden.

Adapun kuesioner untuk mendapatkan data responden diberikan melalui tautan online <https://forms.gle/zGWwSpWsk72WzFUCA>. Kuesioner dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertanyaan terkait identitas responden (jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan masa kerja) dan pertanyaan terkait persepsi responden terhadap komponen Intellectual Capital. Skala pengukuran setiap item kuesioner menggunakan skala 1-5.

Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kinerja belanja. Sementara itu, variabel eksogen dalam penelitian ini adalah *public human capital*, *public organizational capital*, dan *relational public capital*. Untuk indikator yang digunakan dalam penelitian ini tertuang dalam Tabel 2. Data penelitian diuji dengan menggunakan *structural equation model*.

Tabel 2
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator (Item Kuesioner)
<i>Public Human Capital</i> (Ednoer et al., 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya memiliki komitmen yang besar terhadap pekerjaan saya di kantor. 2. Saya mampu memotivasi diri sendiri untuk bekerja dengan baik. 3. Saya mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi saya saat ini

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Saya sering menerima pelatihan khusus yang terkait dengan pekerjaan spesifik yang saya kerjakan saat ini. 5. Saya memiliki banyak pengalaman dan keahlian di bidang pekerjaan dalam organisasi saya. 6. Saya mampu bekerja dalam tim 7. Saya mampu mengkomunikasikan urusan pekerjaan dengan baik kepada rekan kerja/bawahan/atasan saya. 8. Saya memiliki kemampuan leadership yang baik 9. Adanya jumlah pegawai yang cukup dapat mempengaruhi penyerapan anggaran 10. Peran dan fungsi yang jelas dapat mempengaruhi penyerapan anggaran
<p><i>Public Organizational Capital</i> (Ednoer et al., 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi di tempat saya bekerja memiliki budaya organisasi yang mendorong pegawai bekerja secara profesional. 2. Organisasi di tempat saya bekerja memiliki budaya organisasi yang dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja. 3. Budaya organisasi di tempat saya bekerja mendukung pegawai memiliki integritas yang tinggi dalam pekerjaan. 4. Struktur organisasi di tempat saya bekerja sesuai dengan kapasitas pekerjaan yang ada. 5. Struktur organisasi di tempat saya bekerja memungkinkan koordinasi pekerjaan di dalam satu divisi/bagian dengan baik. 6. Struktur organisasi di tempat saya bekerja memungkinkan koordinasi pekerjaan antar divisi/bagian dengan baik. 7. Lingkungan pekerjaan mendukung saya untuk dalam melakukan pembelajaran terus menerus baik secara formal dan informal. 8. Lingkungan pekerjaan saya terbiasa melakukan diskusi dalam menyelesaikan masalah pekerjaan baik secara formal maupun informal. 9. Lingkungan pekerjaan saya terbiasa melakukan diskusi ilmiah terkait dengan bidang pekerjaan organisasi di tempat saya bekerja. 10. Prosedur dan proses kerja saya saat ini memungkinkan saya untuk mengembangkan kompetensi saya. 11. Visi dan Misi Strategis Organisasi tempat saya bekerja tercermin dalam pekerjaan saya. 12. Prosedur operasional standar yang berlaku saat ini sudah efektif dalam penyelesaian pekerjaan di dalam satu bagian/divisi. 13. Prosedur operasional standar yang berlaku saat ini sudah efektif dalam penyelesaian pekerjaan antar bagian/divisi 14. Prosedur operasional standar yang berlaku saat ini sudah efektif dalam menyelesaikan pelayanan kepada relasi kantor/stakeholder 15. Pergantian/mutasi Pimpinan mempengaruhi proses dan program kerja 16. Adanya pengawasan dari pimpinan terhadap pelaksanaan realisasi anggaran.
<p><i>Relational Public Capital</i> (Ednoer et al., 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia barang dan jasa yang bekerja sama dengan kantor saya menyesuaikan kebutuhan dan standar biaya instansi/organisasi. 2. Kantor tempat saya bekerja mampu bekerja sama dengan instansi/kantor di bawah DJKI. 3. Kantor tempat saya bekerja mampu bekerja sama dengan instansi/kantor lain diluar dari DJKI. 4. Pimpinan kantor dikenal luas oleh masyarakat 5. Masyarakat merespon baik terhadap pimpinan kantor di tempat saya bekerja. 6. Kantor tempat saya bekerja memiliki image yang baik di mata pers/media. 7. Dalam penyusunan program kerja selalu melibatkan masyarakat 8. Kemudahan masyarakat dalam mengakses Sistem Informasi DJKI
<p>Kinerja Belanja (Dwiyana, 2018)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) memperhatikan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. 3. Instansi saya tidak mengalami hambatan dalam penyusunan anggaran. 4. Instansi saya tidak mengalami hambatan dalam mencapai penyerapan anggaran yang ideal.

	<p>5. Anggaran yang direalisasikan di instansi saya mampu mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan</p> <p>6. Dalam pengevaluasian keberhasilan penyerapan anggaran di instansi saya selalu dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya</p> <p>7. Realisasi anggaran di instansi saya setiap triwulan mampu mencapai target proporsional yaitu sebesar 25%</p> <p>8. Capaian realisasi fisik dan keuangan di instansi saya setiap triwulan menunjukkan peningkatan yang seimbang</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA di instansi saya dilaksanakan sesuai jadwal</p> <p>10. Di instansi saya selalu membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya</p> <p>11. Di Instansi saya realisasi untuk penyerapan anggaran belanja langsung (program dan kegiatan) tidak pernah mencapai 90%</p> <p>12. Pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara efektif</p> <p>13. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sangat mendukung proses penyerapan anggaran</p>
--	--

4. HASIL PENELITIAN

Tabel 3 menunjukkan hasil uji validitas atas setiap variabel dalam penelitian ini. Untuk memenuhi

persyaratan item kuesioner dinyatakan valid adalah nilai *factor loading*nya lebih besar dari 0,7 (Hussein, 2015).

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Item	Public Human Capital	Public Organizational Capital	Relational Public Capital	Kinerja Belanja
PHC3	0.708			
PHC4	0.807			
PHC5	0.817			
PHC6	0.817			
PHC7	0.767			
PHC8	0.828			
POC1		0.865		
POC2		0.898		
POC3		0.901		
POC4		0.913		
POC5		0.931		
POC6		0.883		
POC7		0.814		
POC8		0.898		
POC9		0.867		
POC10		0.854		
POC11		0.871		
POC12		0.859		
POC13		0.894		
POC14		0.841		
POC16		0.766		
RPC1			0.861	
RPC2			0.849	
RPC3			0.821	
RPC4			0.767	
RPC5			0.849	
RPC6			0.871	
RPC7			0.765	
RPC8			0.763	
KB2				0.703
KB3				0.830
KB4				0.807
KB5				0.874

KB6	0.777
KB7	0.850
KB8	0.870
KB9	0.848
KB10	0.705
KB12	0.769

Sumber: data diolah

Sebelumnya, terdapat indikator yang dieliminasi karena nilai *loading factor* lebih kecil dari 0.7 yakni PHC1, PHC2, PHC9, PHC10, POC15, KB01,

KB11, KB13. Selanjutnya Tabel 4 merupakan hasil uji reliabilitas atas setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Hasil
Public Human Capital	0.882	Reliable
Public Organizational Capital	0.977	Reliable
Relational Public Capital	0.930	Reliable
Kinerja Belanja	0.939	Reliable

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 4 diatas, bahwa variabel *public human capital* memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,882, variabel *public organizational capital* memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,977, variabel *relational public capital* memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,930, dan variabel kinerja belanja memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,939. Secara

keseluruhan, variabel di atas memiliki nilai *cronbach's alpha* di atas 0,7, sehingga bahwa item pertanyaan-pertanyaan dalam keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel. Tabel 5 merupakan ringkasan statistik deskriptif dari variabel penelitian.

Tabel 5
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max.	Mean	Std.Dev.
Public Human Capital	41	3,30	5,00	4,20	0,4489
Public Organizational Capital	41	1,06	5,00	3,77	0,7482
Relational Public Capital	41	2,50	5,00	3,97	0,6037
Kinerja Belanja	41	2,77	5,00	3,72	0,5913

Sumber: data diolah

Selanjutnya, ringkasan pengujian hipotesis terdapat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis

VARIABEL	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	R ²	Adj. R ²
X1 (PHC) -> Y (KB)	0.252	0.243	0.134	1.889	0.030		
X2 (POC) -> Y (KB)	0.552	0.563	0.169	3.272	0.001	0.677	0.651
X3 (RPC) -> Y (KB)	0.216	0.206	0.166	1.303	0.097		

Sumber: data diolah

Pada tabel 6 juga diperoleh nilai Adjusted R² sebesar 0.651. Hasil ini menunjukkan bahwa 65.1% variabel kinerja belanja pada instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh 3 (tiga) variabel yaitu *public human capital*, *public organizational capital*, dan *relational public capital*. Sisanya yaitu sebesar 34.9% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model penelitian, ceteris paribus.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *public human capital* berpengaruh positif terhadap kinerja belanja, sehingga hipotesis 1 diterima. Hasil pengujian ini sejalan dengan Farah & Abouzeid (2017), namun tidak sejalan dengan Ednoer et al. (2022). Pengujian yang dilakukan oleh Ednoer et al. (2022) dilakukan pada instansi pemerintah yang berbeda dan terhadap

kinerja organisasi secara umum. Berdasarkan *resouce based view*, suatu organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitifnya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada internal organisasi tersebut (Firmansyah, 2017; Firmansyah et al., 2021). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan implementasi anggaran di DJKI memiliki peran yang sangat krusial. Oleh karena itu, pemanfaatan penggunaan sumber daya manusia secara optimal merupakan salah satu strategi yang baik digunakan oleh instansi pemerintah dalam pencapaian kinerja belanja yang optimal.

Kemampuan dan kompetensi pegawai merupakan salah satu pendukung dari kualitas belanja yang baik. Selain itu, pengalaman dan keahlian pegawai

yang memadai serta adanya pelatihan yang diberikan kepada pegawai ternyata memiliki kontribusi yang positif pada kinerja belanja. Instansi pemerintah yang memiliki pandangan bahwa peran kompetensi pegawai dalam implementasi anggaran melalui belanja pemerintah dapat mencapai kinerja belanja yang optimal.

Hasil pengujian hipotesis lainnya menunjukkan bahwa *public organizational capital* berpengaruh positif terhadap kinerja belanja, sehingga hipotesis 2 diterima. Hasil pengujian ini sejalan dengan temuan Farah & Abouzeid (2017), dan mengkonfirmasi temuan Ednoer et al. (2022). Berdasarkan *resource-based view*, pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut, termasuk penerapan *public organizational capital* atas kinerja belanja organisasi pemerintah.

Budaya organisasi di DJKI yang melekat pada *organizational capital* dapat meningkatkan motivasi dan mendorong pegawai bekerja secara profesional dan mendukung pegawai untuk memiliki integritas yang tinggi dalam pekerjaan. Selain itu, pegawai menganggap struktur organisasi yang ada telah sesuai dengan kapasitas pekerjaan yang ada. Pegawai juga memandang lingkungan pekerjaan di DJKI mendukung pengembangan kapasitas pegawai melalui pembelajaran yang berkelanjutan dan diskusi untuk menyelesaikan masalah dalam pekerjaan. Selanjutnya, pengawasan dan prosedur operasional standar dianggap telah efektif untuk menyelesaikan pekerjaan. Struktur organisasi yang jelas dapat menciptakan *organizational capital* yang baik, sehingga kondisi ini berdampak pada peningkatan kinerja belanja.

Hasil pengujian terakhir menunjukkan bahwa *relational public capital* juga berpengaruh positif terhadap kinerja belanja, sehingga hipotesis 3 diterima. Hasil pengujian ini mengkonfirmasi temuan Ednoer et al. (2022) walaupun dengan menggunakan organisasi yang berbeda. Sejalan dengan *resource-based view*, kemampuan organisasi pemerintah dalam berhubungan dengan berbagai pemangku kepentingan membuktikan dapat mendukung peningkatan kinerja belanja yang merupakan bagian dari kinerja organisasi instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil survei kuesioner menunjukkan bahwa pegawai memandang organisasinya mampu melakukan kerja sama dengan baik dengan instansi/kantor di bawah DJKI, instansi/kantor lain di luar DJKI, dan penyedia barang dan jasa. Selain itu, peran dan figur pimpinan di DJKI serta kemudahan untuk mengakses informasi penting bagi masyarakat dan media karena hal ini terkait dengan kepercayaan masyarakat dan *image* DJKI. Pegawai juga memandang bahwa penyusunan program kerja yang dilakukan oleh organisasinya selalu melibatkan masyarakat. Belanja pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena masyarakat turut andil dalam penyusunan program kerja, hal ini akan meningkatkan

kinerja belanja pemerintah. Oleh karena itu, implementasi anggaran pada belanja pemerintah akan semakin optimal dengan keterlibatan pemangku kepentingan terkait.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga komponen *intellectual capital* yang terdiri dari *public human capital*, *public organizational capital*, dan *relational public capital* berpengaruh positif terhadap kinerja belanja. Temuan ini mengkonfirmasi *resource-based view* yaitu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi pemerintah dapat meningkatkan kinerja belanja yang merupakan kinerja organisasi.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa instansi Pemerintah di Indonesia perlu memandang bahwa komponen *intellectual capital* dapat dimasukkan sebagai kebijakan atas implementasi anggaran sehingga organisasi tersebut dapat mencapai kinerja organisasinya secara optimal termasuk kinerja belanja. Dengan demikian, harapan agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengalokasian anggaran dengan baik dan tepat sasaran serta manfaat yang diperoleh oleh masyarakat terkait dengan pelayanan sektor publik yang disediakan oleh pemerintah dapat tercapai.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang relatif sedikit dan hanya menggunakan responden di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, beberapa kuesioner tidak dapat digunakan karena adanya indikator yang tidak diisi dengan lengkap oleh responden, sehingga mengurangi sampel penelitian. Selain itu, referensi yang membahas *intellectual capital* di sektor publik juga masih terbatas. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel penelitian yang lebih besar, tidak hanya menggunakan lingkup unit eselon 1 saja, namun dapat menggunakan lingkup kementerian/lembaga untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Amelia, S. (2022). Analisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran (LRA) badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Sukabumi. *Jaz:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 5(1), 76–84. <https://doi.org/10.32663/jaz.v5i1.2841>
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak pendapatan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1295>
- Barney, J. (1991). Resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>

- Baroroh, N. (2013). Analisis pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(2), 11.
- Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. *Management Decision*, 36(2), 63–76. <https://doi.org/10.1108/00251749810204142>
- Campos, E. B., Salmador, M. P., & Merino, C. (2006). Towards a model of intellectual capital in public administrations. *International Journal of Learning and Intellectual Capital*, 3(3), 214–232. <https://doi.org/10.1504/IJLIC.2006.011311>
- Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA). *Media Bina Ilmiah*, 17(1), 93–100. <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/97>
- Citradi, T. (2020). *Miris! belanja negara jauh dari kata produktif*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200107130854-4-128233/miris-belanja-negara-jauh-dari-kata-produktif>
- Dahlan, F., & Madjodjo, F. (2020). Pengaruh komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 196–203. <https://doi.org/10.32400/iaj.31212>
- Dwiningwarni, S. S., & Dindah, P. (2017). Pengaruh budaya organisasi dengan pendekatan integritas, etos dan lingkungan kerja terhadap kinerja organisasi. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 149–160. <https://doi.org/10.26533/eksis.v12i2.104>
- Dwiyana, N. (2018). Factors that influence the application of unit working budget of Medan city government with monitoring and evaluation as a moderating variable. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, 1(2), 1–10. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/876888>
- Ednoer, E. H., Enita, F. D., & Firmansyah, A. (2022). Kinerja organisasi pada instansi pemerintah: bagaimana peran dari capital intellectual? *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 13(2), 50–67. <https://doi.org/10.33558/jrak.v13i1.3216>
- Farah, A., & Abouzeid, S. (2017). The impact of intellectual capital on performance: Evidence from the public sector. *Knowledge Management and E-Learning*, 9(2), 225–238. <https://doi.org/10.34105/j.kmel.2017.09.013>
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2020. *Jurnal Revenue*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Firmansyah, A. (2017). Pengaruh green intellectual capital dan manajemen lingkungan organisasi terhadap green organizational identity dan dampaknya terhadap green competitive advantage. *Substansi*, 1(1), 183–219. <https://doi.org/10.35837/subs.v1i1.215>
- Firmansyah, A., Qadri, R. A., & Arfiansyah, Z. (2021). The green supply chain and sustainability performance in emerging country. *Journal of Governance and Regulation*, 10(1), 139–152. <https://doi.org/10.22495/jgrv10i1art13>
- Firmansyah, A., Wibowo, P., & Puspitarini, I. (2020). The effect of good governance and information technology on the implementation of accrual-based accounting to regional properties. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 1945–1955. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I6/PR260186>
- Grasenick, K., & Low, J. (2004). Shaken, not stirred: Defining and connecting indicators for the measurement and valuation of intangibles. *Journal of Intellectual Capital*, 5(2), 268–281. <https://doi.org/10.1108/14691930410533696>
- Gunawan, C., & Tan, Y. (2014). Pengaruh intellectual capital terhadap traditional measures of corporate performance dari badan usaha manufaktur yang go public di BEI periode 2009–2011. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(2), 1–21. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/483>
- Hasanah, N., & Vidiyastutik, D. (2018). Analisis kinerja realisasi anggaran dalam belanja daerah Pemerintah Probolinggo. *Ecobuss*, 6(2), 26–35. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ecobuss/article/view/338>
- Hesda, A. R. (2017). *Meningkatkan kualitas belanja pemerintah*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12554/Meningkatkan-Kualitas-Belanja-Pemerintah.html>
- Hossain, M. U., & Roy, I. (2016). Human capital management: the new competitive approach. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 4(5), 1020–1034. <http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2016/05/4560.pdf>
- Hussein, A. S. (2015). *Penelitian bisnis dan manajemen menggunakan partial least squares (PLS) dengan smartPLS 3.0*. Jurusan Manajemen, Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. <https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=5786f4c94048544b3332e123&assetKey=AS:383572759334914@1468462280965>
- Katit, F. X. ., & Pitanik, S. (2016). Analisis kinerja belanja pada pemerintah daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua. *Jurnal Emba*, 4(3), 572–582. <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.14291>
- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (lra) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1473–1484. <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.12369>
- Meirina, E., & Dewi, M. K. (2021). Pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja organisasi Universitas Kota Padang dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Pundi*, 5(1), 153–168. <https://doi.org/10.31575/jp.v5i1.325>
- Niswani, N., Ikhyannuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2016–2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>
- Permatasari, D. A., & Trisnainingsih, S. (2022). Pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573–1582. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Rahman, Y., Asruni, A., & Yola, R. (2022). Pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kinerja keuangan pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(1), 37–59. <https://doi.org/10.35972/jieb.v8i1.694>
- Ramadani, A. A. (2020). Intellectual capital dalam strategi sistem informasi (studi kasus pada PT Kioson Komersial Indonesia Tbk). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1), 1–14. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6363>
- Satria, Y., Juanda, B., & Sarma, M. (2018). Strategi peningkatan kualitas belanja daerah Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(Khusus), 1–13. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i-.22699
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018–2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410–415. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>
- Siswanto, D. (2020). Peran intellectual capital terhadap organizational value. *Jurnal KarismaPro*, 10(2), 1–19. <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/karisma-pro/article/view/66/>
- Tahar, A., & Kuncahyo, H. H. (2020). Pengaruh komitmen organisasi, partisipasi penyusunan anggaran, dan kompensasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 45–55. <https://doi.org/10.18196/rabin.v4i2.10707>
- Widyatama, A. (2022). *APBN di masa pandemi*. <https://feb.ub.ac.id/id/apbn-di-masa-pandemi.html>
- Yulianti, R., & Hamdiah, C. (2016). Pengaruh komitmen organisasi, independensi terhadap kinerja auditor BPKP Kota Banda Aceh. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 57–61. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i1.4397>
- Zahara, E. L., Andini, M. S., & Wulandari, S. (2020). Perkembangan komposisi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, jenis dan organisasi tahun 2018–2021. In *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. <https://docplayer.info/193842239-Perkembangan-komposisi-belanja-pemerintah-pusat-berdasarkan-fungsi-jenis-dan-organisasi-tahun.html%0A>